

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Bambang Surtpto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155
E-mail: bambangsurtpto@yahoo.com

ABSTRACT

This research investigates the effect of board commissioner and audit committee characteristics to the financial reporting quality. Board commissioner and audit committee characteristic researched are comprehensive, including job tenure and number directorship that were rarely investigated internationally. Financial reporting quality proxy is accounting discretion used by management in financial reporting. Accounting discretion is measured by accrual discretionary, income smoothing and small negative earnings surprise avoidance. Accrual discretionary is estimated by times series version Jones models (1991) ten years before observation year. Income smoothing and small negative earnings surprise avoidance are measured by quarterly income during three years until observation year. Research sample consists of 385 nonfinancial firm years. Financial firms are excluded from research sample because have accruals that are not comparable with nonfinancial firms. Research results indicate commissioner tenure and number audit committee members who expert in accounting and finance have a negative association with accounting discretion and audit committee size have a positive association with accounting discretion.

Keywords: accounting discretion, accrual discretionary, corporate governance, income smoothing, negative earnings surprise avoidance

JEL Classification: M42

PENDAHULUAN

Integritas laporan keuangan mendapat perhatian besar dari regulator setelah terjadi skandal akuntansi yang melibatkan perusahaan yang terkenal seperti Enron, WorldCom, dan Xerox. Skandal akuntansi sebagian besar melibatkan perusahaan yang secara agresif menerapkan prinsip akuntansi berterima umum. Manajer mengeksploitasi kelemahan tata kelola perusahaan dengan cara menyalahgunakan diskresi akuntansi yang diberikan oleh standar akuntansi berterima umum guna mencapai atau melampaui target laba untuk secara temporer mendongkrak harga saham, menggunakan opsinya, dan mengamankan bonusnya (Matsunaga dan Park, 2001) atau jabatannya (Matsunaga dan Park, 2002). Kejadian semacam itu telah menyebabkan penurunan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan.

Dalam rangka memperbaiki kepercayaan investor terhadap integritas laporan keuangan, lembaga pengatur di berbagai negara telah memberlakukan aturan tata kelola baru mengenai dewan komisaris dan komite audit bagi perusahaan publik. Keputusan regulator meregulasi tata kelola perusahaan setelah banyak terjadi kecurangan laporan keuangan menunjukkan tiga hal penting. Pertama, akurasi dan keandalan informasi keuangan yang digunakan dalam pembuatan keputusan investasi penting bagi integritas pasar modal. Kedua, regulator memandang aturan baru tata kelola perusahaan sebagai mekanisme yang penting untuk menjaga kualitas laporan keuangan. Ketiga, dewan komisaris dan komite audit merupakan bagian

penting tata kelola perusahaan yang berperan besar dalam menjaga integritas laporan keuangan.

Penelitian mengenai keefektifan *corporate governance* di Indonesia sudah banyak dilakukan (Midiastuty dan Machfoedz, 2003; Boediono, 2005; Darmawati, dkk., 2004). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya paling tidak dalam dua hal. Pertama, karakteristik dewan komisaris dan komite audit yang diteliti komprehensif, melibatkan enam karakteristik dewan komisaris dan enam karakteristik komite audit, termasuk di dalamnya masa kerja dan jumlah jabatan anggota dewan komisaris dan komite audit yang secara internasional jarang diteliti (He dkk., 2008). Penelitian sebelumnya sebagian besar mengukur tingkat diskresi akuntansi hanya berdasar akrual diskresional (He dkk., 2008). Penelitian ini mencakup tiga kemungkinan penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen, yaitu: 1) penggunaan akrual diskresional, 2) perataan laba, dan 3) penghindaran penurunan laba dengan pelaporan laba kejutan positif kecil.

Sampel penelitian terdiri atas 385 tahun perusahaan dari sejak tahun 2004 sampai dengan 2009. Perusahaan yang masuk ke dalam sampel penelitian meliputi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha nonkeuangan. Perusahaan dari industri jasa keuangan tidak dimasukkan ke dalam sampel karena akrualnya tidak sebanding dengan industri lainnya (Bowen dkk., 2007). Hasil penelitian menunjukkan masa kerja dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit yang ahli akuntansi dan keuangan berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi, sedangkan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap penggunaan diskresi akuntansi.

MATERIDAN METODE PENELITIAN

Dewan komisaris berperan mengawasi tindakan direksi untuk meminimalkan biaya keagenan yang timbul akibat pemisahan pemilikan dan pengendalian keputusan dalam perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab membentuk sistem pengawasan yang tepat dan memastikan kepatuhan direksi terhadap sistem tersebut. Pengawasan oleh dewan komisaris yang efektif memerlukan proses tata kelola yang secara kolektif ditentukan oleh individu anggota dewan yang memiliki independensi, ketekunan, dan keahlian.

Ukuran dewan komisaris mempengaruhi kemampuan-

nya untuk mengawasi direksi. Namun literatur tidak padu mengenai arah pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap keefektifannya. Ketika anggota dewan komisaris bertambah, lebih kecil kemungkinan berfungsi efektif dan lebih mudah bagi direksi untuk mengendalikannya. Oleh karena sulitnya mengorganisasi dan mengkoordinasi kelompok besar, ukuran dewan komisaris berhubungan negatif dengan kemampuannya untuk memberi nasihat dan melakukan perencanaan strategik jangka panjang. Simpulan itu didukung oleh hasil studi produktifitas kelompok yang menunjukkan suatu kelompok menjadi kurang efektif ketika menambah anggotanya karena biaya koordinasi dan pemrosesan informasi melebihi manfaat yang timbul karena keragaman keahlian yang diperoleh.

Beberapa ahli lainnya berpendapat sebaliknya. Adams dan Mehran (2002) menyatakan perusahaan membutuhkan anggota dewan komisaris yang lebih banyak untuk mengawasi direksi secara efektif. Dewan komisaris yang lebih banyak lebih efektif karena dapat menciptakan hubungan lingkungan yang lebih baik dan menyediakan keahlian yang lebih banyak, dapat memberikan jasa yang lebih beragam, dapat memberikan waktu dan usaha lebih banyak, dan memiliki komisaris yang lebih banyak untuk disebarkan di berbagai komite guna mendistribusi beban pekerjaan (Klein, 2002b). Berdasar argumen yang diajukan, dirumuskan hipotesis yang tidak menentukan arah pengaruh sebagai berikut:
H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Dewan komisaris yang lebih independen dapat mengawasi direksi lebih efektif. Fokus pada independensi didasarkan teori keagenan yang memandang fungsi pengawasan merupakan peran dewan komisaris yang paling penting. Dewan komisaris yang independen dapat mengawasi direksi secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Faktor yang mempengaruhi independensi dewan komisaris meliputi masuknya komisaris independen serta keberadaan komite nominasi dan remunerasi.

Anggota dewan komisaris terdiri atas komisaris yang tidak terafiliasi (komisaris independen) dan komisaris terafiliasi. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari

hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan profesional (KNKG, 2004). Meskipun menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas tidak ada perbedaan tanggung jawab antaranggota dewan komisaris, terdapat kontribusi yang dapat berikan oleh komisaris independen dalam menjamin manajer bertindak demi kepentingan pemegang saham. Komisaris independen dapat mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.

Keefektifan pengawasan dewan komisaris juga dipengaruhi oleh pembentukan komite nominasi dan remunerasi. Komite nominasi akan meniadakan pengaruh direktur utama dalam menominasikan anggota komisaris yang baru. Komite remunerasi dibentuk untuk menyelaraskan kompensasi eksekutif dengan kinerjanya. Aturan NYSE dan NASDAQ mewajibkan pembentukan komite nominasi dan remunerasi yang terdiri sepenuhnya komisaris independen. Kewajiban pembentukan komite nominasi dan remunerasi di Indonesia belum diatur. Berdasar argumen yang diajukan, disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Jumlah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

H3: Keberadaan komite nominasi dan remunerasi berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Pengetahuan anggota komisaris mengenai usaha dan proses tata kelola perusahaan penting bagi keefektifannya. Komisaris dapat memperoleh pengetahuan tersebut melalui pelatihan internal dan eksternal dan pengalaman. Pengalaman anggota komisaris di perusahaan dapat meningkatkan kompetensi pengawasannya karena dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai perusahaan dan eksekutifnya. Senioritas dewan juga dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengawasi karena memiliki posisi yang lebih mapan dan lebih tahan terhadap tekanan kelompok untuk memenuhi keinginan direksi. Berdasar argumen di atas, dirumuskan hipotesis

sebagai berikut:

H4: Masa kerja anggota dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota dewan komisaris dapat mempengaruhi keefektifannya. Namun teori tidak padu mengenai arah pengaruh jumlah jabatan terhadap keefektifan pengawasan dewan komisaris. Pasar komisaris memberikan insentif untuk menjadi pengawas yang baik. Pasar memberi imbalan kepada komisaris yang efektif dan mengenakan pinalti kepada komisaris yang memiliki rekam jejak kinerja pengawasan yang buruk. Komisaris memiliki insentif untuk menjadi pengawas yang efektif karena menjadi komisaris perusahaan yang berjalan baik merupakan sinyal nilai ke pasar eksternal yang akan memberi imbalan berupa jabatan komisaris tambahan. Komisaris yang menjabat di beberapa perusahaan melakukan investasi yang signifikan dalam mengembangkan modal reputasi sebagai ahli pengawas keputusan. Jabatan komisaris tambahan juga memungkinkan komisaris untuk memperoleh kompetensi tata kelola dan pengetahuan praktik terbaik dewan komisaris. Komisaris yang memegang beberapa jabatan akan mengalami kerugian lebih besar akibat perilaku pelaporan keuangan oportunistik oleh manajemen.

Pengawasan manajemen puncak memerlukan waktu dan usaha. Dengan jumlah jabatan yang meningkat, tuntutan yang lebih tinggi atas waktu dan usaha dari seorang komisaris akan menurunkan jumlah perhatian yang dapat diberikan untuk mengawasi sebuah perusahaan. Oleh karenanya, lebih banyak jabatan komisaris berhubungan dengan kualitas pengawasan yang lebih rendah. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Jumlah jabatan yang dipegang oleh komisaris berpengaruh terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Kendala utama keefektifan dewan komisaris adalah kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Dewan yang menunjukkan ketekunan lebih tinggi dalam melaksanakan tanggung jawabnya akan meningkatkan pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan. Ketekunan dewan komisaris ditunjukkan dalam jumlah rapat dan perilaku anggota dalam rapat tersebut, misalnya persiapan sebelum rapat,

tingkat kehadiran, perhatian dan partisipasi selama rapat, dan tindak-lanjut setelah rapat. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Frekuensi rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Keefektifan pengawasan dewan komisaris dipengaruhi oleh bagaimana dewan dibentuk dan diorganisasi. Dewan dapat melaksanakan tugasnya melalui dewan secara keseluruhan atau mendelegasikan kewenangannya kepada komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepadanya. Dewan komisaris dapat mendelegasikan tanggung jawab pengawasan pelaporan keuangan kepada komite audit. Komite audit memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengawasan proses akuntansi dalam rangka menyediakan informasi yang relevan dan andal kepada pemegang saham. Komite audit adalah "*first among equals*" dalam proses akuntansi keuangan dan "*the ultimate monitor*" proses tersebut. Komite audit dapat meningkatkan kemampuan dewan komisaris untuk bertindak sebagai pengawas direksi dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih rinci mengenai laporan keuangan dan informasi keuangan lain yang diterbitkan oleh perusahaan. Keefektifan komite audit dipengaruhi oleh komposisi, kewenangan, sumber daya, dan ketekunan komite audit (DeZoort dkk., 2002).

Regulasi menentukan komite audit terdiri atas sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik (BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004). Regulasi tersebut menunjukkan lembaga pengatur memandang ukuran komite audit dan jumlah komisaris independen yang menjadi anggota komite audit merupakan faktor penting bagi keefektifan pengawasan pelaporan keuangan.

Namun demikian, literatur tidak padu mengenai arah pengaruh ukuran komite audit terhadap keefektifannya. Perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang sedikit akan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengawasi penugasan auditor, melakukan dengar pendapat dengan manajemen, dan melakukan rapat dengan personil sistem pengendalian internal. Argumen yang sebaliknya seperti yang

diberikan terhadap ukuran dewan komisaris juga dapat berlaku untuk komite audit. Oleh karena sulitnya mengorganisasi dan mengkoordinasi kelompok besar, ukuran komite audit dapat berpengaruh negatif terhadap kemampuannya untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Berdasar argumen tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: Ukuran komite audit berpengaruh terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Komposisi komite audit merupakan faktor penting dalam pengawasan yang efektif. Komite audit yang independen lebih dapat mengawasi pelaporan keuangan perusahaan secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Komposisi komite audit menjadi fokus usaha reformasi tata kelola. Pada saat ini semua perusahaan publik yang terdaftar di bursa harus membentuk sebuah komite audit yang terdiri paling tidak tiga anggota yang sepenuhnya independen (BAPEPAM, 2006).

Komite audit yang memiliki status organisasional tinggi, independen, dan kekuasaan besar yang didelegasikan oleh dewan komisaris lebih mungkin dipandang sebagai badan otoritatif oleh manajemen dan auditor eksternal dan internal. Semakin banyak komisaris independen yang menjadi komite audit akan meningkatkan status organisasional dan kekuasaan komite audit sehingga lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Berdasar argumen tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8: Jumlah komisaris independen yang menjadi anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, anggota komite audit harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan. Bapepam-LK mengatur semua anggota komite audit memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan salah seorang anggota memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan (BAPEPAM, Kep-29/PM/2004). Aturan tersebut mengasumsi anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan lebih besar kemungkinan dapat mendeteksi

penyimpangan dalam laporan keuangan. Berdasar argumen tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H9: Jumlah anggota komite audit yang ahli dibidang akuntansi atau keuangan berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

NYSE mengatur jika seorang anggota komite audit menjabat di lebih dari tiga buah perusahaan, dewan komisaris harus menentukan apakah jabatan tersebut akan merusak kemampuannya untuk melaksanakan tugas sebagai anggota komite audit. Peraturan tersebut selaras dengan pengawasan manajemen puncak memerlukan waktu dan usaha. Oleh karena jabatan tambahan di perusahaan lain akan meningkatkan kebutuhan waktu seorang anggota komite, maka hal tersebut akan menurunkan jumlah waktu yang tersedia untuk secara efektif menjalankan tanggungjawab pengawasannya di sebuah perusahaan. Hasil riset konsisten dengan pernyataan tersebut (Persons, 2005).

Argumen sebaliknya seperti yang diajukan untuk dewan komisaris juga dapat berlaku bagi komite audit. Anggota komite audit memiliki insentif untuk menjadi pengawas yang efektif karena menjadi anggota komite audit perusahaan yang berjalan baik merupakan sinyal nilai ke pasar yang akan memberikan imbalan berupa jabatan tambahan. Jabatan tambahan juga memungkinkan anggota komite audit memperoleh kompetensi tata kelola dan pengetahuan praktik terbaik. Hal tersebut mengindikasikan pengaruh positif jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan. Berdasar argumen tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H10: Jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota komite audit berpengaruh terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Anggota komite audit yang kurang senior dapat berpengaruh buruk pada kemampuannya untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Lebih senior anggota komite audit akan kurang rentan terhadap tekanan kelompok dan lebih besar kemungkinan mengkritisi praktik pelaporan yang meragukan oleh perusahaan. Penelitian tersebut mengindikasikan lebih lama masa kerja anggota komite audit berpotensi

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Berdasar argumen tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H11: Masa kerja anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Frekuensi rapat merupakan sinyal kepedulian komite audit terhadap kewajibannya dan ketekunan komite audit. Praktik terbaik merekomendasi tiga atau empat kali rapat dalam setahun. Penelitian memberi bukti komite audit yang rapat lebih sering lebih efektif dalam mengawasi manajemen dan berpotensi meningkatkan kualitas laporan keuangan (Xie dkk., 2002). Berdasar argumen di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H12: Frekuensi rapat yang diselenggarakan oleh komite audit berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Hipotesis penelitian diuji dengan model regresi linear berganda. Variabel dependen penelitian adalah tingkat penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan. Variabel independen penelitian terdiri atas variabel tata kelola perusahaan dan variabel kontrol yang dalam penelitian sebelumnya sudah diidentifikasi sebagai determinan diskresi akuntansi. Variabel kontrol yang dimasukkan ke dalam penelitian ini meliputi rasio ungkitan, ukuran perusahaan, ukuran risiko perusahaan, kinerja perusahaan, dan tahun amatan.

Manajemen dapat menggunakan keleluasaan pelaporannya untuk menyalsakan kinerja perusahaan. Sebagai contoh, manajer dapat melebihsajikan laba yang dilaporkan untuk mencapai target laba tertentu atau melaporkan kinerja yang luar biasa pada saat tertentu, misalnya ketika akan menerbitkan saham. Dalam penelitian ini penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan diukur dengan tiga cara, yaitu 1) penggunaan akrual diskresional, 2) perataan laba melalui akrual, dan 3) penghindaran penurunan laba melalui pelaporan laba kejutan positif kecil.

Nilai absolut akrual diskresional merupakan indikator besarnya penyesuaian yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapat jumlah laba yang dilaporkan. Nilai absolut akrual diskresional yang lebih besar menunjukkan penggunaan diskresi akuntansi yang lebih tinggi dan sebaliknya. Akrual diskresional

diukur dengan cara akrual total dikurangi akrual nondiskresional. Penelitian ini menggunakan model Jones (1991) versi runtut waktu untuk mengestimasi akrual nondiskresional. Model perhitungan akrual nondiskresional dirumuskan sebagai berikut:

$$Akrual\ Total_{it} = \alpha_0 + \alpha_1(1/Akrual\ Total_{t-1}) + \alpha_2(\Delta\ Pendapatan_{it}) + \alpha_3(Aset\ Tetap_{it}) + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Akrual total setiap tahun dihitung dengan cara laba sebelum pos luar biasa dikurangi dengan arus kas dari operasi. Koefisien setiap perusahaan sampel diestimasi berdasar data runtut waktu selama 10 tahun sebelum tahun amatan. Koefisien hasil perhitungan kemudian digunakan untuk mengestimasi jumlah akrual nondiskresional pada tahun amatan. Setelah itu, akrual diskresional setiap tahun amatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Akrual\ Diskresional_{it} = Akrual\ Total_{it} - Akrual\ Nondiskresional_{it} \quad (2)$$

Supaya konsisten dengan rentang waktu yang digunakan untuk mengukur dua diskresi akuntansi lainnya, analisis dilakukan berdasarkan akrual diskresional rata-rata dalam tiga tahun yang berakhir pada tahun amatan.

Ukuran diskresi akuntansi yang kedua, yaitu perataan laba, dihitung dengan cara deviasi standar arus kas operasi dibagi dengan deviasi standar laba (Leuz dkk., 2003). Rasio yang lebih besar dari satu menunjukkan arus kas operasi yang lebih bervariasi dibanding laba, konsisten dengan penggunaan diskresi akuntansi untuk perataan laba. Perusahaan dengan rasio perataan yang lebih tinggi dibanding perusahaan lain dianggap menggunakan diskresi akuntansi yang lebih tinggi dan sebaliknya. Untuk menghitung rasio perataan laba digunakan laba dan arus kas operasi kuartalan selama rentang waktu tiga tahun (dua belas kuartal) yang berakhir pada tahun amatan.

Graham dkk. (2005) menemukan CFO yang memandang laba kuartal yang sama tahun sebelumnya sebagai target yang akan dicapai atau dilampaui. Oleh karena itu, penelitian ini mengukur frekuensi perusahaan melaporkan laba kuartalan kejutan positif kecil selama rentang waktu tiga tahun yang berakhir pada tahun amatan. Laba kejutan positif kecil terjadi

apabila laba kuartal musiman setelah pajak ($Laba_k - Laba_{k-4}$) diskala aset total pada kuartal k-5 berkisar antara 0,00 sampai 0,01 (Burgstahler dan Dichev, 1997). Rasio penghindaran laba kejutan negatif kecil dihitung dengan cara bagian dari 12 kuartal sebelumnya yang menyajikan laba kejutan positif kecil dibagi dengan 12. Perusahaan dengan rasio lebih tinggi menunjukkan manajemen menggunakan diskresi akuntansi yang lebih tinggi dan sebaliknya.

Tiga ukuran di atas merupakan proksi diskresi akuntansi sehingga boleh jadi diukur dengan kesalahan. Untuk mengatasi kesalahan pengukuran dan mempertimbangkan kemungkinan *trade-off* antarjenis diskresi, dalam penelitian ini digunakan indeks diskresi akuntansi yang menggabungkan ketiga ukuran (Leuz dkk., 2003). Setiap ukuran diskresi diurutkan dari paling rendah ke paling tinggi, kemudian nomor urut peringkat masing-masing amatan dibagi dengan jumlah amatan. Ukuran gabungan, yaitu indeks diskresi akuntansi, merupakan hasil rata-rata sederhana peringkat ketiga ukuran diskresi akuntansi. Hasil perhitungan akan berkisar dari 0 sampai dengan 1, 0 = penggunaan diskresi akuntansi paling rendah dan 1 = penggunaan diskresi akuntansi paling tinggi.

Penelitian ini menguji hubungan langsung setiap karakteristik dewan komisaris dan komite audit dengan penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen. Operasionalisasi setiap karakteristik dewan komisaris adalah sebagai 1) ukuran dewan komisaris ditentukan berdasarkan jumlah orang yang menjadi anggota dewan komisaris dibagi aset total; 2) independensi dewan komisaris diukur berdasarkan proporsi jumlah anggota komisaris independen dibagi jumlah seluruh anggota dewan komisaris; 3) keberadaan komite nominasi dan remunerasi diukur dengan dumi; 4) masa kerja dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah masa kerja seluruh anggota dewan komisaris dibagi jumlah anggota; 5) jumlah jabatan yang dipegang anggota dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah jabatan yang dipegang oleh semua anggota dewan dibagi jumlah anggota dewan; dan 6) ketekunan dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris selama setahun. Karakteristik komite audit yang diduga berhubungan dengan keefektifan pengawasan pelaporan keuangan perusahaan diukur berdasarkan 1) ukuran komite audit ditentukan berdasar jumlah orang yang menjadi anggota

dibagi aset total; 2) komisaris independen yang menjadi anggota komite audit diukur berdasar jumlah komisaris independen yang menjadi anggota komite audit dibanding jumlah seluruh anggota komite; 3) keahlian akuntansi/keuangan diukur berdasar jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi/keuangan dibagi jumlah anggota komite; 4) jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota komite diukur berdasarkan jumlah jabatan yang dipegang oleh semua anggota komite audit dibagi jumlah anggota komite; 5) masa kerja anggota komite audit diukur berdasarkan jumlah masa kerja seluruh anggota komite audit dibagi jumlah anggota komite; dan 6) ketekunan komite audit diukur berdasarkan jumlah rapat yang diselenggarakan oleh komite audit perusahaan selama setahun.

Kothari dkk. (2005) menyatakan penelitian diskresi akuntansi yang tidak mengontrol kinerja salah spesifikasi. Untuk mengontrol pengaruh kinerja pada diskresi akuntansi, peneliti memasukkan imbal hasil dari aset (ROA) ke dalam model. ROA dihitung dengan cara laba sebelum pos luar biasa dibagi aset total tahun sebelumnya. Perusahaan dengan volatilitas laba lebih besar memiliki biaya modal yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih berisiko boleh jadi menggunakan diskresi akuntansi yang lebih besar untuk menurunkan persepsi risiko guna menurunkan biaya modalnya. Peneliti memproksi risiko dengan

deviasi standar ROA selama lima tahun yang berakhir pada tahun amatan. Peneliti juga memasukkan dumi tahun untuk mengontrol semua variasi yang tidak terobservasi dalam lingkungan perusahaan.

Populasi penelitian meliputi semua perusahaan publik nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian dipilih berdasar ketersediaan data. Data karakteristik dewan komisaris dan komite audit diperoleh dari laporan tahunan, sedangkan data keuangan diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan kuartalan. Data penelitian diperoleh dari situs BEI (www.idx.co.id), situs perusahaan sampel, dan ICMD. Sampel adalah tahun perusahaan yang datanya dapat diperoleh secara lengkap dari sumber-sumber tersebut. Sampel penelitian terdiri atas 385 tahun perusahaan nonkeuangan dari periode amatan tahun 2004 sampai dengan 2009.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif karakteristik dewan komisaris dan komite audit. Jumlah anggota dewan komisaris rata-rata 4,54; jumlah komisaris independen rata-rata 1,76; jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota dewan komisaris rata-rata 1,24; masa kerja anggota dewan komisaris rata-rata 5,72; jumlah rapat yang diselenggarakan oleh dewan

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Tata Kelola Perusahaan

Variabel	Min.	Mak.	Mean	Deviasi Std.
Anggota komisaris	2	13	4,54	2,000
Komisaris independen	0	8	1,76	1,186
Komite nominasi dan remunerasi	0	1	0,24	0,427
Jumlah jabatan anggota komisaris	0	10	1,24	1,147
Masa kerja komisaris	0	21	5,72	3,501
Rapat komisaris	0	37	3,37	5,201
Anggota komite audit	0	7	2,83	1,211
Komisaris independen yang menjadi komite	0	3	0,94	0,562
Jumlah jabatan anggota komite audit	0	3	0,44	0,681
Jumlah ahli akuntansi dan keuangan	0	5	0,96	1,129
Masa kerja komite audit	0	21	3,13	2,204
Rapat komite audit	0	72	4,16	7,789

Sumber: Data penelitian, diolah.

komisaris selama satu tahun rata-rata 3,37. Data keberadaan komite nominasi dan remunerasi merupakan dumi 1 jika ada dan 0 untuk lainnya. Jumlah rata-rata 0,24 menunjukkan sebagian besar perusahaan sampel tidak memiliki komite tersebut. Data deviasi standar dalam tabel menunjukkan sampel penelitian cukup bervariasi dalam enam karakteristik dewan komisaris yang diteliti.

Tabel 1 juga menunjukkan data jumlah anggota komite audit rata-rata 2,83; jumlah komisaris independen yang menjadi anggota komite audit rata-rata 0,94; jumlah jabatan anggota komite audit rata-rata 0,44; jumlah anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan rata-rata 0,96; masa kerja anggota komite audit rata-rata 3,13; dan jumlah rapat komite audit dalam satu tahun rata-rata 4,16. Data deviasi standar menunjukkan sampel penelitian cukup bervariasi dalam enam karakteristik komite audit tersebut.

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif tiga ukuran diskresi akuntansi serta indeks diskresi akuntansi yang menggabungkan ketiga ukuran. Rata-rata tiga tahun nilai absolut akrual diskresional perusahaan sampel sebesar 3,6% dari aset total. Rata-rata rasio perataan laba perusahaan sampel mendekati 3, menunjukkan arus kas bervariasi hampir tiga kali lipat dari laba. Perusahaan sampel rata-rata melaporkan laba kejutan positif kecil 2,74 kali dalam dua belas kuartal terakhir atau 22,8%. Sebagai konsekuensi dari cara pengukuran yang digunakan, indeks diskresi akuntansi memiliki rata-rata 0,5.

Tabel 3 menyajikan data korelasi antarukuran diskresi akuntansi. Statistik menunjukkan korelasi yang signifikan hanya terjadi antara frekuensi laba kejutan positif kecil dan perataan laba tetapi tidak besar (0,312). Meskipun ada kemungkinan terdapat elemen yang sama dalam ketiga ukuran (misalnya perusahaan dapat menggunakan akrual diskresional untuk mencapai target laba atau meratakan laba), data korelasi menunjukkan ketiga ukuran menangkap jenis diskresi akuntansi yang berbeda. Pemakaian indeks diskresi akuntansi memiliki keunggulan karena dapat menangkap atribut dari semua ukuran. Indeks diskresi akuntansi menunjukkan korelasi yang signifikan dengan ketiga ukuran (0,18 dengan akrual diskresional, 0,49 dengan perataan laba, dan 0,69 dengan frekuensi laba kecil). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda, untuk menjamin validitas simpulan, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan meliputi asumsi normalitas, multikolinearitas, homogenitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian asumsi-asumsi tersebut menunjukkan tidak terjadi pelanggaran asumsi yang dapat menimbulkan masalah yang serius.

Oleh karena data korelasi yang disajikan dalam Tabel 3 menunjukkan ketiga ukuran menangkap jenis diskresi akuntansi yang berbeda, maka masing-masing akan diinterpretasi secara tersendiri. Hasil uji regresi disajikan dalam Tabel 4. Pada Tabel 4 disajikan hasil regresi untuk setiap ukuran diskresi akuntansi sebagai variabel independen dalam kolom tersendiri.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Elemen Diskresi Akuntansi

Elemen	Minimum	Maksimum	Mean	Dev. Std.
Akrual diskresional	0,00005	0,72668	0,03637	0,06743
Perataan laba	0,08073	33,20199	2,99921	4,63550
Frekuensi pelaporan laba kejutan kecil	0,00000	12,00000	2,74000	2,48500
Persentase pelaporan laba kejutan kecil	0,00000	1,00000	0,22835	0,20711
Indeks diskresi akuntansi	0,06147	0,94285	0,50129	0,17886

Sumber: Data penelitian, diolah.

Tabel 3
Korelasi Antar Elemen Diskresi Akuntansi

Elemen	Akrual Diskresional	Perataan Laba	Frekuensi Laba Kecil	Indeks Diskresi Akuntansi
Akrual diskresional	1,000	-0,090	-0,053	**0,177
Perataan laba	-0,090	1,000	**0,312	**0,488
Frekuensi laba kejutan kecil	-0,053	**0,312	1,000	**0,691
Indeks diskresi akuntansi	**0,177	**0,488	**0,691	1,000

** Korelasi signifikan pada tingkat 0,01 (2-sisi).

* Korelasi signifikan pada tingkat 0,05 (2-sisi).

Tabel 4
Estimasi Determinan Diskresi Akuntansi

Variabel	Prediksi Arah	Indeks Diskresi Akuntansi (1)	Akrual Diskresional (2)	Perataan Laba (3)	Frekuensi Laba Kecil (4)
TH2005	+/-	***2,588	-0,312	***2,698	**2,382
TH2006	+/-	***2,614	-0,253	***3,421	*1,664
TH2007	+/-	**2,081	-1,199	***3,535	1,512
TH2008	+/-	**2,268	-1,590	***3,572	**2,202
TH2009	+/-	1,304	***-3,255	***3,770	*1,888
Aset Total	+	-1,206	** -2,451	0,473	-0,250
Return on Assets (ROA)	+/-	-0,048	-1,557	**2,227	-0,734
Variasi ROA	+	0,668	0,181	0,334	0,712
Leverage	+	** -2,089	0,962	** -2,514	** -2,292
Ukuran Komisaris	+/-	-1,589	* -1,816	-0,033	-1,077
Komisaris Independen	-	-1,098	1,774	*** -2,823	-0,982
Komite Nominasi dan Remunerasi	-	-0,720	1,419	-1,522	-1,218
Masa Kerja Komisaris	-	*** -3,889	-0,276	*** -4,270	*** -2,637
Jabatan Komisaris	+/-	-0,737	-0,027	0,249	-1,559
Rapat Komisaris	-	1,294	*1,693	-0,750	1,426
Ukuran Komite Audit	+/-	*1,721	0,610	0,582	**1,965
Independensi Komite	-	0,838	0,997	-0,419	0,955
Ahli Akuntansi dan Keuangan	-	** -2,346	* -1,672	-1,124	-1,532
Jabatan Komite Audit	+/-	1,321	-0,726	0,757	**2,379
Masa Kerja Komite	-	-1,482	** -2,004	0,247	-0,971
Rapat Komite Audit	-	0,662	0,275	0,523	0,425
Adj R ² total		8,7%	8,5%	9,3%	5,2%
F-stat (p-value) total		2,742 (0,000)	2,687 (0,000)	2,870 (0,000)	1,993 (0,006)
Adj R ² variabel GCG saja		6,8%	4,3%	3,6%	4,1%
Variable GCG saja		3,342 (0,000)	2,421 (0,005)	2,193 (0,012)	2,379 (0,006)

***Signifikan pada tingkat 0,01; **signifikan pada tingkat 0,05; *signifikan pada tingkat 0,10.

PEMBAHASAN

Hasil hitungan variabel kontrol memiliki tanda koefisien yang tidak sesuai prediksi dan/atau tidak signifikan pada level konvensional apabila digunakan variabel independen dengan ukuran indeks diskresi akuntansi. Satu-satunya koefisien dengan arah sesuai dengan prediksi dan signifikan pada level konvensional adalah ROA apabila digunakan variabel independen dengan ukuran perataan laba.

Meskipun tidak diajukan hipotesis secara formal, hasil hitungan dua tahun amatan memberikan hasil yang menarik. Dibandingkan tahun 2004 (tahun dasar), hasil hitungan menunjukkan koefisien tahun menunjukkan trend positif untuk indeks diskresi akuntansi yang signifikan pada level konvensional. Tren tersebut didukung dan lebih persisten apabila digunakan ukuran perataan laba. Tren yang sama juga terjadi, meskipun kurang persisten, apabila digunakan ukuran frekuensi pelaporan laba kejutan positif kecil. Kecenderungan sebaliknya terjadi apabila digunakan ukuran akrual diskresional tetapi tidak ada koefisien tahun yang signifikan pada level konvensional. Hasil tersebut memberikan indikasi penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan setelah tahun 2004 pada tingkat yang lebih tinggi.

Hasil regresi antara ukuran dewan komisaris dengan indeks akrual diskresional menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -1,816 dan p -value 0,070. Oleh karena itu, penelitian berhasil memberikan bukti yang mendukung H1 bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi untuk manajemen laba. Hasil tersebut konsisten dengan hasil riset di U.S. (Xie dkk., 2003). Hasil penelitian tidak konsisten dengan argumen dewan dengan ukuran besar merupakan pengawas yang buruk terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Hasil regresi antara komisaris independen dengan peringkat perataan laba menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -2,823 dan p -value 0,005. Oleh karena itu, penelitian berhasil memberikan bukti yang mendukung H2 bahwa jumlah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan untuk perataan laba. Hasil tersebut konsisten dengan hasil riset di U.S.

(Klein, 2002a). Hasil penelitian ini konsisten dengan argumen jumlah komisaris independen yang lebih banyak akan meningkatkan independensi dewan komisaris sehingga dapat menjadi pengawas yang lebih baik terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Hasil regresi antara masa kerja dewan komisaris dengan indeks diskresi akuntansi menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -3,889 dan p -value 0,000; antara masa kerja komisaris dengan peringkat perataan laba menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -4,270 dan p -value 0,000; dan antara masa kerja dewan komisaris dengan pelaporan laba kejutan positif kecil menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -2,637 dan p -value 0,009. Oleh karena itu, penelitian berhasil memberikan bukti yang mendukung H4 bahwa masa kerja dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan, terutama untuk meratakan laba dan melaporkan laba kejutan positif kecil. Hasil tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Xie dkk. (2003). Hasil penelitian ini konsisten dengan argumen masa kerja meningkatkan kemampuan komisaris untuk mengawasi manajemen secara efektif.

Hasil regresi antara ukuran komite audit dengan indeks diskresi akuntansi menunjukkan tanda koefisien positif sesuai prediksi dengan nilai t hitung 1,721 dan p -value 0,086 dan antara ukuran komite audit dengan peringkat pelaporan laba kejutan positif kecil menunjukkan tanda koefisien positif sesuai prediksi dengan nilai t hitung 1,965 dan p -value 0,050. Oleh karena itu, penelitian ini berhasil memberikan bukti yang mendukung H7 bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen untuk pelaporan laba kejutan positif kecil. Hal tersebut konsisten dengan argumen semakin besar ukuran komite audit akan semakin sulit untuk diorganisasi dan dikoordinasi sehingga akan menurunkan kemampuannya dalam mengawasi pelaporan keuangan. Penelitian lainnya tidak berhasil memberi bukti mengenai hubungan antara ukuran komite audit dengan manajemen laba (Xie dkk., 2003).

Hasil regresi antara jumlah anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan dengan indeks diskresi akuntansi menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -2,346 dan

p-value 0,019 dan antara jumlah anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan dengan peringkat akrual diskresional menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -1,672 dan p-value 0,095. Oleh karena itu, penelitian berhasil memberikan bukti yang mendukung H9 bahwa jumlah anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan terutama untuk manajemen laba. Hasil tersebut konsisten dengan argumen keahlian akuntansi atau keuangan anggota komite audit meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Xie dkk. (2003).

Hasil regresi antara jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota komite audit dengan peringkat pelaporan laba kecil menunjukkan tanda koefisien positif sesuai prediksi dengan nilai t hitung 2,379 dan p-value 0,018. Oleh karena itu, penelitian berhasil memberikan bukti yang mendukung hipotesis H10 bahwa jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota komite audit berpengaruh positif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan terutama untuk menyajikan laba kejutan positif kecil. Hasil tersebut konsisten dengan argumen semakin banyak jabatan yang dipegang oleh anggota komite audit akan mengurangi jumlah waktu yang dapat disediakan untuk sebuah perusahaan sehingga akan menurunkan kemampuannya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya (Persons, 2005).

Hasil hitungan regresi antara masa kerja anggota komite audit dengan peringkat akrual diskresional menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -2,004 dan p-value 0,046. Oleh karena itu, penelitian berhasil memberikan bukti yang mendukung H11 bahwa masa kerja anggota komite audit berpengaruh negatif dengan penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan terutama untuk manajemen laba. Hasil tersebut konsisten dengan argumen lebih senior anggota komite audit akan kurang rentan terhadap tekanan kelompok dan lebih besar kemungkinan mengkritisi praktik pelaporan keuangan yang

meragukan oleh manajemen. Penelitian tidak berhasil memberikan bukti keberadaan komite nominasi dan remunerasi berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang tidak berhasil memberikan bukti dominasi direktur atas dewan komisaris berpengaruh buruk terhadap kualitas pelaporan keuangan (Xie dkk., 2003). Hasil-hasil tersebut diduga terjadi karena fungsi nominasi dan remunerasi terlalu jauh dari fungsi pelaporan keuangan untuk dapat memberi pengaruh langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan (He, dkk., 2008). Penelitian tidak berhasil memberikan bukti jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota dewan berpengaruh terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan. Penelitian tidak berhasil memberikan bukti jumlah rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan. Hasil tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya (Xie dkk., 2003). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan proposisi ketekunan dewan komisaris meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian dilakukan terhadap 385 tahun perusahaan nonkeuangan publik yang terdaftar di BEI sejak tahun 2005 sampai 2009 untuk menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan yang diukur dengan penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen. Berdasar hasil penelitian diperoleh simpulan faktor-faktor berikut ini berpengaruh positif terhadap kemampuan dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan laporan keuangan, yaitu 1) ukuran dewan komisaris, 2) jumlah komisaris independen, dan 3) masa kerja anggota dewan komisaris. Selain itu, berdasar hasil penelitian juga diperoleh simpulan bahwa faktor-faktor berikut ini berpengaruh positif terhadap kemampuan komite audit menjalankan fungsi pengawasan laporan keuangan, yaitu 1) ukuran komite audit, 2) jumlah anggota komite

audit yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan, 3) jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota komite audit, dan 4) masa kerja anggota komite audit.

Saran

Simpulan di atas harus dipertimbangkan bersamaan dengan keterbatasan yang melekat dalam penelitian ini. Sampel penelitian tidak dipilih secara acak sehingga ada kemungkinan tidak mewakili populasi. Data karakteristik dewan komisaris dan komite audit sebatas yang dapat diperoleh dari informasi yang dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan dan tidak mencakup tata kelola internal perusahaan dan tidak mencakup tata kelola eksternal perusahaan. Oleh karena kualitas pelaporan keuangan tidak dapat diamati secara langsung, penelitian ini menggunakan diskresi akuntansi sebagai proksi kualitas pelaporan keuangan. Meskipun ukuran diskresi akuntansi yang digunakan *state-of-the-art*, masih ada kemungkinan kualitas pelaporan keuangan dalam penelitian ini diukur dengan kesalahan. Terdapat kemungkinan penelitian lebih lanjut di masa datang dengan memasukkan variabel baru, misalnya variabel tata kelola eksternal. Penelitian yang akan datang juga dapat dilakukan dengan sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda untuk mengetahui kekuatan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. dan H. Mehran. 2002. *Board Committee Structures, Ownership, and Firm Performance*. Working Paper: New York Federal Reserve.
- BAPEPAM-LK. 2006. *Studi Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance*. Jakarta: Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance.
- Boediono, S.B. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governace dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi VIII, IAI, 2005.
- Bowen, R.M., S. Rajgopal, dan M. Venkatachalam. 2007. *Accounting Discretion, Corporate Governance and Firm Performace*. Working Paper: University of Washington and Duke University.
- Darmawati, D., Khomsiyah, dan Rahayu, R.G. 2004. *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi VII, IAI, 2004.
- DeZoort, F.T, D.R. Hermanson, D.S. Archaubeault, dan S.A. Reed. 2002. "Audit Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee Literature". *Journal of Accounting Literature* (21): 38-75.
- Graham, J., C. Harvey, dan S. Rajgopal. 2005. "The Economics Implication of Corporate Financial Reporting". *Jurnal of Accounting and Economics* (40): 3-73.
- He, L., R. Labelle, C. Piot, dan D.B. Thornton. 2009. "Board Monitoring, Audit Committee Effectiveness, and Financial Reporting Quality: Review and Synthesis of Empirical Literatur". *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, Vol. 1, No. 2. Available at SSRN: <http://ssrn.com>
- Jones, J. 1991. "Earnings Management During Import Relief Investigations". *Journal of Accounting Research* (29): 193-228.
- Klein, A. 2002a. "Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management". *Journal of Accounting and Economics* (33): 375-400.
- Klein, A. 2002b. "Economic Determinants of Audit Committee Independence". *The Accounting Review* 77 (2): 435-452.
- KNKG. 2004. *Pedoman Tentang Komisaris Independen*. <http://www.governance-indonesia.or.id/main.htm>.

KNKG. 2004. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.

Kothari, S.P., A. Leone dan C. Wasley. 2005. "Performance Matched Discretionary Accrual Measures". *Journal Accounting and Economics* (39): 163-197.

Leuz, C., D. Nanda, dan P.D. Wysocki. 2003. "Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison". *Journal of Financial Economics* (69): 505-527.

Matsunaga, S. dan C. Park. 2001. "The Effect of Missing a Quarterly Earnings Benchmark on The CEO's Annual Bonus". *The Accounting Review* (76) 313-332.

Matsunaga, S. dan C. Park. 2002. *The Effect of Consecutively Missing Quarterly Forecasts on CEO Turnover*. Working Paper, University of Oregon and HKUST.

Midiastuty, P.P dan Mahfoedz, M. 2003. *Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba*. Simposium Nasional Akuntansi VI. IAI, 2003.

Persons, O.S. 2005. "The Relation Between the New Corporate Governance Rules and the Likelihood of Financial Statement Fraud". *Review of Accounting & Finance* 4 (2): 125-148.

Xie, B., W. N. Davidson III, dan P.J. DaDalt. 2003. "Earnings Management and Corporate Governance: The Role of The Board and The Audit Committee". *Journal of Corporate Finance* 9: 295-316.